

## **DAMPAK KEBIJAKAN LUAR NEGERI CHINA DI LAUT CHINA SELATAN TERHADAP STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN KAWASAN ASIA TENGGARA TAHUN 2020- 2023**

**Kahfi Khairulsah<sup>1</sup>**

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

### **ABSTRACT**

The South China Sea (SCS) dispute is one of the main issues in the political and security dynamics of Southeast Asia. China's foreign policy to strengthen its claims over the region, including through artificial island construction and increased military activities, has heightened tensions with ASEAN countries. This study aims to analyze the impact of China's foreign policy on political stability and security in Southeast Asia during the 2020-2023 period. Using a qualitative approach with a literature review method, this research examines China's various policies and the responses of ASEAN countries to China's claims and activities in the SCS. The findings indicate that China's policies have increased regional instability, marked by rising diplomatic tensions, the strengthening of ASEAN countries' military capabilities, and intensified regional security cooperation. This study highlights the need for a balance of power strategy and stronger multilateral diplomacy to de-escalate conflicts and maintain regional stability.

**Keywords:** South China Sea, China's foreign policy, political stability, regional security, ASEAN.

### **ABSTRAK**

Sengketa di Laut China Selatan (LCS) menjadi salah satu isu utama dalam dinamika politik dan keamanan kawasan Asia Tenggara. Kebijakan luar negeri China dalam memperkuat klaimnya atas wilayah tersebut, termasuk melalui pembangunan pulau buatan dan peningkatan aktivitas militer, telah memicu ketegangan dengan negara-negara ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan luar negeri China terhadap stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara selama periode 2020-2023. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji berbagai kebijakan China dan respons negara-negara ASEAN terhadap klaim serta aktivitas China di LCS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan China telah meningkatkan ketidakstabilan kawasan, ditandai dengan meningkatnya tensi diplomatik, penguatan kapabilitas militer negara-negara ASEAN, serta intensifikasi kerja sama keamanan regional. Studi ini menyoroti perlunya strategi keseimbangan kekuatan (*balance of power*) serta diplomasi multilateral yang lebih kuat guna meredam eskalasi konflik dan menjaga stabilitas regional.

**Kata kunci:** Laut China Selatan, kebijakan luar negeri China, stabilitas politik, keamanan kawasan, ASEAN.

## PENDAHULUAN

Laut China Selatan (LCS) merupakan kawasan maritim yang memiliki nilai strategis tinggi, baik dari segi ekonomi, politik, maupun keamanan. Selain menjadi jalur perdagangan internasional utama, kawasan ini juga kaya akan sumber daya alam, seperti minyak dan gas bumi. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, LCS menjadi pusat sengketa geopolitik yang melibatkan China dan beberapa negara Asia Tenggara, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Sengketa ini dipicu oleh klaim tumpang tindih atas wilayah maritim, di mana China mendasarkan klaimnya pada konsep *Nine-Dash Line*, yang mencakup hampir 90% LCS. Klaim ini bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang menjadi dasar hukum bagi negara-negara lain dalam menentukan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Ramon, 2022).

Dalam upaya memperkuat klaimnya, China menerapkan kebijakan luar negeri yang agresif, termasuk pembangunan pulau buatan, peningkatan patroli militer, serta pengerahan kapal penjaga pantai dan milisi laut (Intan, 2022). Langkah-langkah ini telah meningkatkan ketegangan diplomatik dan militer di kawasan, memicu reaksi dari negara-negara ASEAN serta aktor global seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Beberapa negara Asia Tenggara, terutama Filipina dan Vietnam, telah mengajukan protes keras dan meningkatkan kerja sama keamanan dengan kekuatan eksternal, sementara negara lain memilih jalur diplomasi untuk menghindari eskalasi konflik.

Alasan lain mengapa wilayah ini begitu kontroversial adalah karena wilayah ini kaya akan cadangan minyak dan gas alam. Diketahui, Laut China Selatan mengandung sekitar 7,7 miliar barel minyak. Kandungan gas alam saat ini diperkirakan mencapai sekitar 266 triliun kaki kubik. Hal ini akan mengubah Laut China Selatan menjadi ladang minyak besar dan tangki gas yang menguntungkan (IDN Times, 2021). Dinamika kebijakan luar negeri China di LCS memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas politik dan keamanan kawasan. Ketegangan yang meningkat dapat berujung pada konflik bersenjata, mengganggu stabilitas ekonomi, serta melemahkan solidaritas ASEAN dalam menyikapi isu ini. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan luar negeri China terhadap stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara selama periode 2020-2023.

## **KERANGKA ANALITIK**

### **Neo – Realisme**

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori neorealisme yang menjelaskan bahwa perilaku negara cenderung dipengaruhi oleh struktur internasional yang bersifat anarkis dimana bahwa tak ada otoritas tunggal yang mengatur dalam dunia internasional dan tak ada yang bisa menjamin keamanan setiap negara yang pada akhirnya mendorong suatu negara melakukan pertahanan dengan meningkatkan kapabilitas baik ekonomi maupun militer, dan mendorong negara melakukan *struggle for power* dalam percaturan politik internasional (Jackson & Sorensen, 1999).

Teori ini dapat menjelaskan fenomena permasalahan yang hendak peneliti angkat. Dalam kasus ini dari struktur internasional diimplementasikan dengan adanya kebijakan luar negeri China yang mengklaim Sembilan garis putus-putus (*Nine – Dash Line*). Adanya klaim sepihak atas teritori tersebut berdampak pada negara di Asia Tenggara khususnya yang berbatasan langsung dengan LCS. Adanya tindakan provokatif di kawasan LCS membuat negara-negara di kawasan merasa terancam karena ada sebagian dari wilayah negaranya yang diakui dalam Sembilan garis putus-putus (*Nine – Dash Line*) tersebut.

### **Konsep Kebijakan Luar Negeri**

Teori ini menjelaskan alasan di balik pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara. Menurut William D. Coplin, politik luar negeri mencakup tiga jenis aktivitas, yaitu kebijakan umum, keputusan administratif, dan keputusan kritis (Coplin, 2003). Coplin juga menekankan bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer, serta konteks internasional. Ketiga faktor ini berkontribusi secara parsial terhadap kebijakan luar negeri, sehingga tidak ada satu faktor tunggal yang sepenuhnya menentukan keputusan tersebut. Selain itu, faktor lain juga dapat memengaruhi terbentuknya kebijakan luar negeri. Dengan memahami ketiga pertimbangan utama ini, analisis kebijakan luar negeri suatu negara dapat dilakukan dengan lebih sistematis.

Dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin negara mempertimbangkan politik domestik, kondisi ekonomi dan militer, serta dinamika internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri bukan hanya berdasarkan keinginan individu pemimpin, tetapi merupakan hasil dari berbagai pertimbangan strategis. Meskipun demikian, pengambil keputusan tetap memiliki peran utama karena memiliki kewenangan

dalam menetapkan kebijakan luar negeri. Teori kebijakan luar negeri membantu menjelaskan mengapa dan bagaimana China mengambil kebijakan di Laut China Selatan serta bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara. Penelitian ini mengaplikasikan teori tersebut untuk menganalisis interaksi antara China dan negara-negara ASEAN dalam menghadapi sengketa ini.

### **Konsep Balance of Power**

*Balance of power* dibuat sebagai sistem yang disesuaikan untuk menjaga keseimbangan kekuatan dalam permasalahan-permasalahan tersebut. Penyeimbangan kekuatan dilakukan oleh suatu negara sebagai bentuk pertahanan supaya tidak adanya dominasi dari negara lain akibat hegemoni. Paul, Wirtz & Fortman menjelaskan tujuan dasar dari suatu negara melakukan *balance of power* (T. V. Paul & Wirtz, 2004).

Tujuan dasar tersebut, pertama sistem internasional bersifat anarki tidak ada satupun aktor yang dapat memberikan jaminan keamanan untuk negara. Kedua, keinginan negara untuk mempertahankan hidupnya menjadi sebuah entitas yang independen. Ketiga, Persaingan ekonomi dan militer yang terjadi dalam politik internasional. Keempat, Ketika suatu negara berupaya untuk menjadi negara lebih dominan, maka akan muncul rasa terancam oleh negara lain dan memicu adanya koalisi pertahanan atau bahkan meningkatkan *power* yang ada di negaranya. Waltz memberikan dua solusi untuk mengatasi permasalahan dalam *balance of power* yaitu *balancing* dan *bandwagoning*.

Dalam konteks penelitian ini, salah satu tindakan yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah dengan menyatukan kepentingan di LCS untuk melawan klaim sepihak dari China. Pembangunan pangkalan militer di kawasan LCS berpotensi menimbulkan konflik yang meluas sehingga akan berdampak pada stabilitas keamanan di kawasan tersebut.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif karena dalam penelitiannya akan memberikan data deskriptif dalam bentuk informasi tertulis yang peneliti peroleh dari sumber tertulis seperti informan atau studi pustaka terkait. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, peneliti akan menjelaskan kejadian berdasarkan data yang telah dikumpulkan kemudian menganalisis hubungan antara kejadian tersebut dengan pertanyaan yang diajukan peneliti. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pengolahan dan analisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan. Hal tersebut dikarenakan permasalahan dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat mengalami perkembangan sehingga kesimpulan dari penelitian kualitatif bersifat dinamis dan tidak kaku.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji kebijakan China di LCS, respons negara-negara ASEAN, serta implikasi dari dinamika ini terhadap keseimbangan kekuatan di kawasan. Melalui analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan mengenai tantangan dan peluang dalam menjaga stabilitas regional serta upaya strategis yang dapat dilakukan untuk meredam eskalasi konflik.

## **PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Luar Negeri China Atas Laut China Selatan**

China mengklaim Laut China Selatan (LCS) melalui konsep Nine-Dash Line, yang didasarkan pada klaim historis sejak Dinasti Zhou hingga saat ini. China berargumen bahwa wilayah tersebut telah menjadi bagian dari mereka selama ribuan tahun, dan publikasi peta serta pemberian nama pulau oleh pemerintah China semakin memperkuat klaim ini.

Klaim China atas LCS didorong oleh beberapa faktor utama. Dari segi ekonomi, kawasan ini memiliki cadangan minyak dan gas yang besar serta merupakan jalur perdagangan strategis yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi China. Secara politik, LCS menjadi bagian dari strategi geopolitik China untuk memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara dan menegaskan konsep “Satu China,” termasuk integrasi Taiwan. Dari sisi keamanan dan pertahanan, China memperkuat kehadirannya dengan membangun pulau reklamasi, pangkalan militer, serta melakukan patroli maritim guna menghadapi tekanan dari negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat.

Sengketa LCS melibatkan China, Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei, Taiwan, dan Indonesia, dengan perselisihan terkait batas laut, kepulauan Spratly dan Paracel, serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). China memanfaatkan Laut China Selatan sebagai tempat memperoleh sumber minyak baru dan jalur perdagangan internasional (Science Direct, 2021). Vietnam dan Filipina menjadi negara yang paling aktif menentang klaim China, sementara Indonesia sering menghadapi gangguan di perairan Natuna Utara akibat aktivitas kapal China di wilayah tersebut. Dalam menghadapi sengketa ini, ASEAN berupaya mencari penyelesaian diplomatik melalui dialog, tetapi belum ada konsensus yang tegas

dalam menghadapi ekspansi China. Beberapa negara pun meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat serta memperkuat kapabilitas maritim mereka. Secara keseluruhan, China terus memperkuat klaimnya di LCS dengan mengeluarkan kebijakan politik luar negeri ekspansionis yang agresif dengan membangun pulau reklamasi, kota, dan peningkatan aktivitas militer. Sementara negara-negara ASEAN berusaha mempertahankan kedaulatan mereka melalui berbagai strategi diplomatik dan militer.

### **1. Pembangunan Kota dan Pulau Reklamasi di Laut China Selatan**

China melakukan reklamasi di Laut China Selatan sebagai strategi untuk mempertegas klaimnya atas wilayah tersebut, kepentingan militer, dan ekonomi. Antara 2013 hingga 2015, China telah membangun pulau buatan seluas hampir 3.000 hektar di Kepulauan Spratly, yang dianggap melanggar hukum internasional dan mendapat gugatan di Pengadilan Arbitrase Internasional (Komisi Peninjauan Ekonomi & Keamanan AS - Tiongkok, 2016). Meskipun Konvensi Hukum Laut 1982 tidak secara spesifik mengatur reklamasi, China memanfaatkan celah hukum untuk memperluas klaimnya. Selain membangun pulau, China juga mendirikan fasilitas militer dan infrastruktur di wilayah sengketa untuk memperkuat kehadirannya, termasuk di Pulau Triton yang ditandai dengan simbol nasional China.

Reklamasi ini meningkatkan ketegangan dengan negara-negara ASEAN seperti Vietnam dan Filipina, yang juga mengklaim bagian dari wilayah tersebut. Selain itu, China juga membangun Kota Sansha seluas 800 ribu mil persegi untuk memperkuat kontrolnya di kawasan. Langkah ini memicu kekhawatiran internasional karena berpotensi mengancam kedaulatan negara-negara sekitar dan meningkatkan konflik di wilayah strategis ini.

### **2. Peningkatan Aktivitas Militer di Sekitar Wilayah Laut China Selatan**

Ketegangan di Laut China Selatan terus meningkat akibat manuver China yang mempertegas posisinya di kawasan ini. Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) telah mengembangkan fasilitas militer di Kepulauan Spratly dan Paracel, termasuk pembangunan 72 hanggar jet tempur, yang memungkinkan China mendominasi udara dan laut di wilayah tersebut. Selain itu, China rutin menggelar latihan dan patroli militer, seperti yang dilakukan pada 2020 di perairan Kepulauan Paracel, yang memicu protes dari Vietnam (Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia, 2020). Ketegangan juga terjadi pada 2021 ketika 16 jet tempur China memasuki wilayah udara Malaysia serta insiden pada Desember 2023 di mana kapal penjaga pantai China menyerang kapal Filipina di Second

Thomas Shoal dengan meriam air. Negara-negara ASEAN seperti Brunei, Indonesia, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam menilai tindakan China semakin agresif, terutama karena seringnya penyusupan ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka. Filipina menyebut eskalasi ini sebagai ancaman serius yang dapat memperburuk hubungan dengan China.

### **Klaim Sepihak China Atas Laut China Selatan Yang Dianggap Mengambil Sebagian Wilayah Perairan Sejumlah Negara**

China mengklaim Laut China Selatan sejak 1970-an dengan alasan ekonomi, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, China memandang cadangan minyak di kawasan ini sebagai sumber energi strategis untuk jangka panjang. Dari segi politik, klaim ini menjadi bagian dari strategi geopolitik China untuk menegaskan pengaruhnya di Asia Tenggara. Selain itu, China berupaya memperkuat kekuatan maritimnya, mengembangkan angkatan lautnya dari kekuatan pantai menjadi *blue water navy* agar mampu beroperasi di wilayah samudra luas. Klaim ini tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei, sehingga memicu ketegangan serta mengganggu stabilitas politik dan keamanan di kawasan.

#### **1. Dampak Terhadap Indonesia**

Laut China Selatan memiliki sumber daya alam melimpah yang menjadikannya kawasan strategis bagi Indonesia. Namun, klaim eksklusif China dan aktivitas militernya di wilayah tersebut, terutama di perairan Natuna Utara, mengancam pertahanan dan keamanan Indonesia. Ancaman ini meliputi riset ilmiah oleh kapal asing, pencemaran minyak lintas negara, serta praktik penangkapan ikan ilegal. Untuk menghadapi agresi China, Indonesia meningkatkan kekuatan militernya dengan pembangunan wilayah di Natuna, pengadaan alutsista baru, serta produksi persenjataan dalam negeri melalui PT PINDAD dan PT PAL. Dengan kekuatan angkatan laut yang kini masuk empat besar dunia, Indonesia tidak hanya mempertahankan kedaulatan, tetapi juga memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN guna menyeimbangkan dominasi China di kawasan.

#### **2. Dampak Terhadap Vietnam**

Vietnam menuntut kedaulatan atas Kepulauan Paracel dan Spratly berdasarkan sejarah dan Hukum Laut Internasional untuk memperkuat Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta kebebasan navigasi di Laut China Selatan. Sengketa ini semakin memperburuk hubungan dengan China, yang terus melakukan ekspansi, termasuk eksplorasi minyak di ZEE Vietnam melalui kerja sama dengan perusahaan asing. Menanggapi hal ini, Vietnam

membawa sengketa ke forum internasional, memperluas hubungan diplomatik, serta meningkatkan kekuatan militer dengan menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN guna menghalangi ekspansi China di kawasan.

### **3. Dampak Terhadap Brunei**

Brunei tidak mengakui klaim China atas Laut China Selatan tetapi tetap menjaga hubungan baik dengan semua pihak, termasuk China dan Amerika Serikat, sebagai strategi keseimbangan kekuatan. Meskipun tidak bersikap konfrontatif, Brunei tetap berpegang pada prinsip hukum internasional dan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada UNCLOS. Sikap ini mencerminkan kebijakan non-intervensi dan fokus pada visi nasionalnya, seperti Wawasan Brunei 2035. Brunei juga memperkuat kerja sama ekonomi dengan China serta menjalin kolaborasi pertahanan dengan AS, termasuk penggunaan drone untuk pengawasan pantai dan operasi kemanusiaan. Dengan tidak terlibat langsung dalam konflik, Brunei menjaga stabilitas ekonomi dan politiknya sambil mempertahankan hubungan strategis dengan kedua kekuatan besar tersebut.

### **4. Dampak Terhadap Filipina**

Hubungan Filipina dan China semakin memanas akibat sengketa Laut China Selatan, terutama setelah Filipina mengajukan gugatan atas sejumlah pulau yang dianggap mengancam kedaulatan dan ekonominya. Di bawah kepemimpinan Presiden Ferdinand Marcos Jr., Filipina menegaskan tidak akan membiarkan wilayahnya direbut, dengan dukungan kuat dari Amerika Serikat sebagai mitra strategis. Kedekatan Filipina-AS memberikan akses pangkalan militer bagi AS dan latihan gabungan, yang semakin membuat China waspada terhadap campur tangan AS. Marcos juga mengecam tindakan China terhadap nelayan Filipina sebagai agresif dan ilegal, meskipun tetap mengedepankan diplomasi. Sementara itu, AS berkomitmen terus mendukung Filipina dalam menghadapi ancaman di wilayahnya.

### **Respon Negara-Negara ASEAN**

Konflik Laut China Selatan tidak hanya berdampak pada negara-negara yang bersengketa, tetapi juga pada stabilitas kawasan ASEAN. Untuk mencegah eskalasi konflik, ASEAN mengadopsi *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)* pada 1976, yang menekankan penyelesaian damai tanpa kekerasan. Pada 2002, ASEAN dan China juga menyetujui *Declaration of Conduct (DOC)* untuk mencegah tindakan provokatif, namun China tetap melakukan ekspansi maritim, termasuk menguasai Scarborough Shoal pada 2012. Sikap China ini menimbulkan ketegangan dengan negara-negara ASEAN, terutama

Filipina dan Vietnam yang paling vokal dalam menentang klaim China. Sementara itu, Kamboja cenderung mendukung China, terbukti dalam kegagalan ASEAN mencapai kesepakatan terkait konflik ini pada 2012. Di tengah dinamika ini, Indonesia tetap menegaskan netralitasnya meskipun menolak klaim China atas perairan Natuna. Sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia berhasil mendorong inisiatif maritim dan menerbitkan dua *Code of Conduct*, *ASEAN Maritime Insights 2023*, serta pernyataan bersama tentang stabilitas maritim Asia Tenggara, yang menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan di Laut China Selatan.

### **1. Upaya penyelesaian Konflik Melalui ASEAN**

Indonesia dan negara-negara ASEAN berupaya menyelesaikan sengketa Laut China Selatan secara diplomatik melalui perundingan dan penerapan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. UNCLOS mengatur batas wilayah maritim, hak kedaulatan negara, serta zona ekonomi eksklusif (ZEE). China mengklaim Laut China Selatan dengan *Nine-Dash Line* berdasarkan sejarah, termasuk konsep *Traditional Fishing Ground*. Namun, klaim ini bertentangan dengan UNCLOS, terutama Pasal 58 dan 76 yang menetapkan batas ZEE dan landas kontinen (United Nation, 2024). Klaim sepihak China juga melanggar Pasal 2 dan 289 UNCLOS karena menimbulkan perselisihan dengan negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus dilakukan secara damai sesuai Pasal 59 UNCLOS.

### **2. Upaya Penyelesaian Konflik Hubungan Antara Negara**

Sengketa Laut China Selatan melibatkan China dan empat negara ASEAN—Filipina, Vietnam, Malaysia, serta Brunei—yang mengklaim wilayah maritimnya berdasarkan UNCLOS 1982. Konflik ini diperumit oleh perbedaan interpretasi hukum dan kepentingan nasional masing-masing negara, yang menyebabkan eskalasi ketegangan. Indonesia, meskipun bukan pengklaim utama, turut terdampak karena wilayah maritim dan ZEE-nya berada di jalur strategis yang diperebutkan. Sebagai ketua ASEAN, Indonesia berperan dalam menjaga stabilitas kawasan dengan mengupayakan penyelesaian melalui jalur diplomasi, perundingan bilateral, mekanisme ASEAN, serta arbitrase internasional sesuai UNCLOS 1982. Dalam menghadapi agresi China, Indonesia meningkatkan peran strategisnya, termasuk melalui kerja sama maritim dengan Vietnam, yang menghasilkan Perjanjian Batas ZEE pada 2023. Upaya ini memastikan hak-hak maritim kedua negara dihormati dan meminimalkan konflik. Selain itu, Indonesia mendorong mekanisme kerja

sama regional guna mencegah konflik berkepanjangan serta memperkuat simbol-simbol kedaulatan dan supremasi hukum di perbatasan maritimnya. Klaim China atas *Nine-Dash Line* bertentangan dengan UNCLOS 1982 dan telah ditolak oleh Permanent Court of Arbitration (PCA) dalam kasus yang diajukan Filipina. Meski China menolak putusan ini, keputusan PCA tetap sah secara hukum internasional. Indonesia menekankan pendekatan diplomasi berbasis *Confidence Building Measures* (CBM) di ASEAN dan mengupayakan penyelesaian sengketa melalui negosiasi damai. Penyelesaian konflik di LCS dapat lebih efektif jika Amerika Serikat meratifikasi UNCLOS dan berperan sebagai mediator dalam sengketa antara China dan negara-negara ASEAN.

### **3. Meningkatkan Kapabilitas Internal Untuk Mengimbangi Ancaman**

Keamanan maritim Asia Tenggara bergantung pada kerja sama global dan regional yang inklusif berdasarkan aturan internasional. Meski penting, visi bersama negara-negara ASEAN terkait maritim masih belum terjalin. Perjanjian trilateral antara Filipina, Indonesia, dan Malaysia pada 2017 menunjukkan upaya meningkatkan *Maritime Domain Awareness* (MDA), yang dapat diperluas ke negara ASEAN lainnya. UNCLOS menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan sengketa perbatasan laut dan memperkuat stabilitas maritim melalui Komunitas Keamanan ASEAN. Untuk mengurangi ketegangan, protokol keamanan maritim diperlukan guna menekan manuver angkatan laut di kawasan Laut China Selatan. Dalam Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia mendorong peningkatan kerja sama maritim dengan membentuk *ASEAN Maritime Outlook* (AMO), sebagai dokumen strategis untuk memperkuat sinergi antarnegara ASEAN dan mitra eksternal. ASEAN juga telah mencetuskan berbagai forum keamanan maritim seperti *ASEAN Maritime Forum* (AMF) dan *Expanded ASEAN Maritime Forum* (EAMF). Agenda ASEAN 2025 menargetkan penguatan kerja sama maritim melalui pembentukan *ASEAN Special Maritime Partnership* (ASMP), guna meningkatkan koordinasi, kredibilitas, serta respons terhadap tantangan maritim. Inisiatif ini bukanlah bentuk militerisasi, melainkan strategi untuk memperkuat stabilitas kawasan dan mekanisme kepercayaan antarnegara ASEAN (Kementrian Luar Negeri, 2023).

### **4. Menyatukan Kepentingan Di LCS Untuk Melawan Klaim Sepihak Dari China**

Sengketa Laut China Selatan sulit diselesaikan karena setiap negara memiliki kepentingan dan pendekatan yang berbeda, meskipun tergabung dalam ASEAN. Filipina mendesak ASEAN bersikap tegas terhadap China, sementara Malaysia lebih lunak karena hubungan dagangnya dengan China. ASEAN tetap menginginkan kawasan yang stabil,

tetapi perbedaan kepentingan membuat penyelesaian konflik secara kolektif sulit dilakukan (BBC News, 2015). China memanfaatkan ketimpangan ini dengan membangun pulau buatan dan memperkuat kehadiran militernya. Kehadiran Amerika Serikat semakin memperumit situasi, karena negara-negara kawasan harus menyeimbangkan hubungan dengan kedua kekuatan besar tersebut. Beberapa negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Kamboja berupaya menjalin hubungan baik dengan China sekaligus memperkuat kemitraan dengan AS guna menjaga stabilitas kawasan tanpa memihak salah satu pihak.

## **KESIMPULAN**

Sengketa Laut China Selatan mencerminkan ketegangan geopolitik yang kompleks di kawasan ASEAN, di mana dominasi China berpotensi mengontrol eksplorasi sumber daya dan menekan negara-negara sekitarnya. Keempat negara ASEAN (Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei) bersengketa dengan China, sehingga netralitas kawasan sulit dipertahankan jika terjadi konflik global. ASEAN berupaya menyelesaikan sengketa ini dengan menerapkan UNCLOS 1982, meskipun interpretasi kepentingan nasional yang berbeda memperumit konflik. Laut China Selatan yang strategis sebagai pusat geoekonomi dan jalur energi menuntut ASEAN untuk bersatu dalam menjaga stabilitas regional. Meski ASEAN menolak agresi China, kerja sama maritim dan diplomasi tetap diperlukan untuk menyeimbangkan hubungan dengan China dan Amerika Serikat guna menjaga keamanan dan keseimbangan geopolitik di kawasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Coplin, W. D. (2003). *Pengantar Politik Internasional*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (1999). *Introduction to International Relations*. oxfordshire: Oxford University Press.
- T. V. Paul, F. M., & Wirtz, J. J. (2004). *Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century*. Stanford: Stanford University Press.

### **Internet**

- BBC News. (2015). *ASEAN masih 'terpecah' soal sengketa Laut Cina Selatan*. Retrieved from bbc.com: [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150427\\_asean\\_laut\\_cina\\_selatan](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150427_asean_laut_cina_selatan)
- IDN Times. (2021). *5 Fakta Laut China Selatan yang Jadi Rebutan Banyak Negara*. Retrieved from Idntimes.com. : <https://www.idntimes.com/science/experiment/mutia-zahra-4/fakta->

laut-china-selatan-yang-jadi- rebutan-c1c2?page=all

- Intan. (2022). *Laut China Selatan Memanas! Ada Kerajaan Militer Baru*. Retrieved from CNBC: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220323055200-4-325104/laut-china-selatan-memanas-ada-kerajaan-militer-baru>
- Kementrian Luar Negeri. (2023). *ASEAN Maritime Outlook (AMO): Inisiatif Indonesia Perkuat Kerja Sama Maritim ASEAN yang Komprehensif*. Retrieved from kemlu.go.id.: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5152/berita/asean-maritime-outlook-amo-inisiatif-indonesia-perkuat-kerja-sama-maritim-asean>
- Komisi Peninjauan Ekonomi & Keamanan AS - Tiongkok. (2016). *Pembangunan Pulau Tiongkok di Laut Cina Selatan: Kerusakan Lingkungan Laut, Implikasinya, dan Hukum Internasional*. Retrieved from www.uscc.gov: [https://www.uscc.gov/research/chinas-island-building-south-china-sea-damage-marine-environment-implications-and?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_](https://www.uscc.gov/research/chinas-island-building-south-china-sea-damage-marine-environment-implications-and?_x_tr_sl=en&_)
- Ramon, A. A. (2022, January 1). *UNCLOS dan Indonesia: Refleksi Menjelang 40 Tahun Pembentukan Konvensi PBB Tahun 1982*. Retrieved from lbhpayogoman.unpar.ac.id. : <https://lbhpayogoman.unpar.ac.id/unclos-dan-indonesia-refleksi-menjelang-40-tahun-pembentukan-konvensi-pbb-tahun-1982/#:~:text=UNCLOS%2019>
- Science Direct. (2021). *How does geopolitical uncertainty affect Chinese overseas investment in the energy sector? Evidence from the South China Sea Dispute*. Retrieved from www.sciencedirect.com: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014098832100267X>
- Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia. (2020). *China latihan militer di Laut China Selatan, Vietnam ajukan keberatan.* . Retrieved from setnasean.id: <https://setnasean.id/news/read/china-latihan-militer-di-laut-china-selatan-vietnam-ajukan-keberatan>
- United Nation. (2024). *United Nations. 2024. United Nations Convention on the Law of the Sea*. Retrieved from www.un.org: [www.un.org](http://www.un.org). [https://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/unclos\\_e.pdf](https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf)